

PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-BALI DAN JAWA TAHUN 2019-2021

Putu Dany Indrawan Sidhi¹, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi²

^{1,2}S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| dany@undiksha.ac.id, ²| ayu.wulan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* pada kinerja keuangan provinsi/kabupaten/kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan dua pengujian data regresi yaitu regresi linier berganda dan regresi linier sederhana. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 126 pemerintah daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 2) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 3) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 5) Koefisien DAU terhadap belanja modal lebih besar dibanding dengan PAD terhadap belanja modal, yang artinya telah terjadi *flypaper effect*; 6) *Flypaper effect* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus berupaya memaksimalkan peran PAD dalam melakukan belanja daerah agar tidak terjadi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Kata kunci: *flypaper effect*, dana perimbangan, kinerja keuangan, belanja modal.

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of the flypaper effect on the financial performance of provinces/districts/cities throughout Bali and Java in 2019-2021. This study used two regression data tests, namely multiple linear regression and simple linear regression. The sample selection was carried out using purposive sampling method in order to obtain a total sample of 126 local governments. The results of the study found that 1) the General Allocation Fund (DAU) has a significant effect on capital expenditures; 2) Special Allocation Funds have no significant effect on capital expenditures; 3) Profit Sharing Fund (DBH) has no significant effect on capital expenditure; 4) Regional Original Income (PAD) has no significant effect on capital expenditure; 5) The coefficient of DAU on capital expenditure is greater than PAD on capital expenditure, which means that there has been a flypaper effect; 6) Flypaper effect has no significant effect on financial performance. Based on this condition, it is hoped that local governments will continue to maximize the role of PAD in conducting regional expenditures so that there is no dependence on balancing funds.

Keywords : *flypaper effect, transfer funds, financial performance, capital spending.*

1. Pendahuluan

Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, wilayah Bali dan Jawa mendapat dampak yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan pada tahun 2020 melalui PP No.21 Tahun 2020 hingga dikeluarkan lagi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Bali dan Jawa, yang mulai berlaku dari tanggal 16 November sampai dengan tanggal 29 November 2021. Akibat diberlakukannya peraturan tersebut, kegiatan masyarakat dan perekonomian menjadi lesu, dan kementerian keuangan telah mem-pertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1 Data Realisasi PAD Seluruh Pemda se-Provinsi di Bali dan Jawa

Daerah	2019	2020	2021
Provinsi Bali	97,77%	80,3%	84,99%
Provinsi Jawa Timur	102,93%	94,39%	110,52%
Provinsi Jawa Barat	107,65%	94,06%	91,46%
Provinsi Jawa Tengah	101,43%	93,64%	107,02%
Provinsi Banten	100,95%	87,01%	99,53%
DKI Jakarta	83,32%	67,99%	80,18%
DI Yogyakarta	102,51%	90,26%	105,47%

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat penurunan persentase realisasi PAD tertinggi pada seluruh pemda se-Provinsi Bali sebesar 17,47% (97,77% - 80,3%) dan yang terendah terdapat pada pemda se-Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,79% (101,43% - 93,64%). Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2021, seluruh daerah terlihat telah mampu meningkatkan PAD-nya kembali. Namun, 4 dari 7 daerah masih belum mampu mencapai PAD tertingginya pada tahun 2019. Daerah tersebut yaitu Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa masih perlu adanya upaya lebih dalam peningkatan PAD oleh pemerintah daerah bersangkutan.

Dengan turunnya PAD di seluruh wilayah Bali dan Jawa, seharusnya kemandirian fiskal menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai ditengah situasi pandemi COVID-19. Namun demikian, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, masih terdapat 9 daerah di wilayah Bali dan Jawa yang termasuk ke dalam daerah dengan status IKF 3 (mandiri) yaitu Kota Surabaya (0,5685), Kota Tangerang Selatan (0,5121) Kabupaten Badung (0,5420), Provinsi Bali (0,5367), Provinsi Banten (0,5290), Provinsi Jatim (0,5671), Provinsi Jateng (0,5383), Provinsi Jabar (0,5140), dan Provinsi DKI Jakarta (0,6365). Namun, status yang disandang oleh daerah-daerah tersebut nyatanya tidak serta merta membuat pemanfaatan terhadap PAD-nya telah dilakukan secara maksimal. Berdasarkan penilaian kualitas desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2020 ditemukan bahwa Kabupaten Badung, dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki IKF sebesar 0,5420 dan 0,5140 belum dapat membiayai sebagian besar belanja pemerintah daerah dengan menggunakan PAD-nya.

Hubungan antara belanja pemerintah daerah dengan sumber pendapatan yang dimiliki, berkaitan erat dengan teori keagenan. Berdasarkan teori ini pemerintah pusat (selaku prinsipal) memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (selaku agen) untuk dapat mengatur daerah mereka sendiri. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, dalam usahanya untuk mengatur daerahnya tersebut, pemerintah daerah akan menerima transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Dana transfer dari pemerintah pusat dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah.

Pada prakteknya, transfer dari pemerintah pusat justru digunakan sebagai sumber dana utama pemerintahan daerah untuk membiayai belanja daerah, yang oleh pemerintah

daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Berdasarkan fenomena ini kemudian muncul sebuah kondisi yang disebut dengan *flypaper effect* yaitu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerah-nya lebih besar dengan dana transfer daripada pendapatan asli daerah (Putri & Kurnia, 2020).

Belanja daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam kebijakan daerah, pemerintah dituntut untuk menggunakan dana secara efektif dan efisien karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Kinerja keuangan ini akan menentukan sejauh mana pemerintah daerah terkait dapat mengelola dana yang dimilikinya. Dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya diperlukan sebuah alat ukur, salah satu ukuran yang digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah yaitu analisis rasio efisiensi. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kriteria efisiensi kinerja, yaitu: rasio < 100% memiliki kriteria efisien, rasio > 100% memiliki kriteria tidak efisien, dan rasio = 100% memiliki kriteria efisien berimbang (Dewi & Wiguna, 2019).

Dalam konteks kebijakan belanja pemerintah, fenomena *flypaper effect* sudah dikaji dalam banyak literatur. Penerimaan berupa dana transfer dari pemerintah pusat menstimulasi peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pada pendapatan asli daerah dan secara simultan hal tersebut berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Pangesti & Faridatussalam, 2022). Selanjutnya, *flypaper effect* juga telah terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan yang digambarkan dengan rasio desentralisasi fiskal (Abdullah, 2020)

Namun demikian, beberapa penelitian memiliki hasil yang kontradiktif. Pada penelitian mereka, tidak ditemukan adanya fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia. Hasil ini ditemukan pada penelitian (Octaviana, 2021), (Chadiza & Syahnur, 2022), dan (Rianti, 2020). Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan dana transfer.

Selanjutnya, dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan, terdapat dua hal yang menjadi fokus peneliti untuk menentukan kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, masih sedikit penelitian yang menggunakan rasio efisiensi dalam pengukuran kinerja keuangan pada fenomena *flypaper effect* ini. (Radjak & Latarang, 2021) merupakan satu dari sangat sedikit peneliti yang berupaya meneliti mengenai pengaruh *flypaper effect* pada efisiensi belanja daerah di Provinsi Gorontalo. Padahal, rasio ini sangat penting digunakan untuk menggambarkan kualitas belanja daerah yang dilakukan pemerintah mengingat fenomena *flypaper effect* berhubungan erat dengan tingginya belanja daerah akibat dana transfer yang meningkat. Kedua, pada penelitian yang sejenis, hanya satu variabel dana transfer yang digunakan untuk menganalisis *flypaper effect*. Seperti penelitian milik (Kesuma, 2022) yang hanya menggunakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, pada penelitian kali ini variabel dana transfer yang digunakan berjumlah tiga yaitu (DAU, DAK dan DBH). Selanjutnya, dari ketiga dana transfer ini akan dianalisis variabel penyebab *flypaper effect*, lalu akan diuji dengan variabel kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memperdalam dan memperluas penelitian mengenai pengaruh *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap kinerja keuangan dengan judul "Pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021."

Menurut UU No. 33 tahun 2004 dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Afiffa & Rahayu, 2022), menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara dana alokasi umum dengan variabel belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (BM)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Helmayunita, 2020), diperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Gerungan et al., 2017) dan (Kanaiya & Mustanda, 2020), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (BM).

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Terdapat hubungan positif signifikan antara dana bagi hasil dengan variabel belanja modal (Junaedy, 2015). Dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal (Susanti et al., 2016). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nopitasari, 2017), hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Prabawati & Wany, 2018), memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Noviarti & Rahayu, 2021), menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM)

Menurut (Tasri, 2019) *flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat suatu daerah merespon belanja lebih besar menggunakan dana transfer daripada pendapatan asli daerah-nya sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Azhar, 2018) didapatkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Modal daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Modal sehingga dinyatakan *flypaper effect* telah terjadi pada penelitian tersebut. Begitu juga dengan penelitian oleh (Paramartha & Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh lebih besar daripada PAD terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Terdapat dana perimbangan (DAU, DAK, atau DBH) yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Belanja Modal (BM) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Menurut (Dewi & Wiguna, 2019) Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan penelitian (Abdullah, 2020) ditemukan bahwa terjadinya *flypaper effect* berdampak pada menurunnya kinerja keuangan. Oleh dari itu, semakin besar pengaruh *flypaper effect* maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Flypaper Effect berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi/kabupaten /kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria: a) Data keuangan APBD provinsi/kabupaten/kota se-Bali dan Jawa yang telah tercatat pada laman situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id, b) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten /kota se-Bali dan Jawa yang mem-publikasikan Laporan Realisasi Anggaran secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2019-202; dan c) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten /kota se-Bali, dan Jawa yang mendapat dana transfer berupa DAU, DAK, DBH berturut-turut dalam kurun waktu tahun 2019-2021.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi).

3. Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data mengenai DAU, DAK, DBH, PAD, dan Belanja Modal pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021 diperoleh statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Alokasi Umum	261	34671000000	1591291632000	876440783575,37	264364958522,100
Dana Alokasi Khusus	261	38075162616	591400000000	284474914674,49	120661786739,815
Dana Bagi Hasil	261	13318908684	193190000000	73383549978,09	42290598483,839
Pendapatan Asli Daerah	261	104325150582	717400615564	352634163302,66	138408399604,371
Belanja Modal	261	59276068157	690653593571	325122694621,34	136637953968,941
Kinerja Keuangan	261	,844	1,059	,98432	,035537

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi dilakukan dengan 4 (tiga) pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan hasil Sig. sebesar 0.200, nilai ini sudah melebihi syarat normalitas sebesar 0.05. Dengan ini, maka data yang diuji sudah berdistribusi normal. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji untuk masing-masing variabel, nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0.10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini berarti tidak terjadi korelasi antar variabel bebas sehingga tidak mengganggu hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Hasil uji menyatakan bahwa nilai Std Error variabel independen penelitian ini lebih kecil dari 0.05 sebagai syarat absolut residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas dan dinyatakan bahwa data yang diuji bersifat homokedastisitas. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji durbin watson. Hasil uji ini menunjukkan bahwa $dU < DW < 4-dU$ ($1,825 < 1,530 < 2,175$), artinya tidak terjadi korelasi antara ada korelasi antara suatu periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).

Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier berganda dan analisis linier sederhana digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini menguji variabel DAU (X1), DAK (X2), DBH (X3), dan PAD (X4) terhadap belanja modal (Y), dan model regresi linier sederhana digunakan untuk menguji variabel *flypaper effect* terhadap kinerja keuangan. Hasil regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pengujian 1

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,161	1,024		,157	,875
	DAU_lg10	,796	,159	,588	4,993	,000
	DAK_lg10	,050	,091	,062	,550	,583
	DBH_lg10	,036	,032	,051	1,117	,265
	PAD_lg10	,075	,060	,068	1,255	,211

Berdasarkan tabel 3 diatas, persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$BM = 0,161 + 0,796 \text{ DAU} + 0,050 \text{ DAK} + 0,036 \text{ DBH} + 0,075 \text{ PAD}$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,161 memiliki arti bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai 0 (nol) maka Belanja Modal akan sebesar 0,161.
- 2) Nilai koefisien DAU sebesar 0,7699 mengindikasikan bahwa apabila DAU meningkat sebesar 1 satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,796 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 3) Nilai koefisien DAK sebesar 0,050 mengindikasikan bahwa apabila DAK meningkat sebesar 1 satuan maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 0,050 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 4) Nilai koefisien DBH sebesar 0,036 mengindikasikan bahwa apabila DBH meningkat sebesar 1 satuan, maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 0,036 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 5) Nilai koefisien PAD sebesar 0,075 mengindikasikan bahwa apabila PAD meningkat sebesar 1 satuan maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 0,075 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pada hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.10 dijelaskan bahwa nilai koefisien DAU sebesar 0,796 lebih besar dari koefisien standar beda PAD yaitu 0,060. Selain itu, PAD juga memiliki nilai signifikan diatas 0,05 yang berarti PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan jika *flypaper effect* telah terjadi dan akan diprosikan oleh DAU pada pengujian kedua berikut ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengujian 2

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,490	5,180		,674	,501
	DAU_lg10	-,202	,435	-,029	-,465	,642

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$KK = 3,490 - 0,202DAU$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa apabila DAU bernilai 0 (nol) maka Kinerja Keuangan akan sebesar 3,490. Sedangkan, koefisien DAU sebesar -0,202 menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 0,202.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *adjusted r square* sebesar 0,466 pada pengujian 1 yang dapat diartikan bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD sebesar 46,6%. Sementara sisanya sebesar 53,4% persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sedangkan pada pengujian 2 didapatkan nilai *r square* sebesar 0,001 yang dapat diartikan bahwa Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel *flypaper effect* sebesar 0,1%. Sementara sisanya sebesar 99,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menemukan adanya hubungan positif yang signifikan dari DAU terhadap belanja modal, maka hipotesis diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($4,993 < 1,969$), dan nilai koefisien DAU sebesar 0,796. Ini menunjukkan bahwa ketika DAU meningkat, maka belanja modal juga akan meningkat signifikan.

DAU bersifat "*block grant*", hal ini memungkinkan daerah menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah (Apriyanto, 2016). Menurut teori agensi, pelimpahan wewenang dilakukan oleh prinsipal (pemerintah pusat) terhadap agen (pemerintah daerah). Hubungan ini memberikan keleluasaan pada agen untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pada saat pandemi COVID-19 sedang terjadi pada tahun 2020 tepatnya pada semester 1, ditemukan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (Afifita & Rahayu, 2022). Mereka menjelaskan bahwa DAU digunakan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum suatu daerah. Menurut UU No 23 Tahun 2014, layanan dasar umum yang dimaksud menyangkut mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang yang kegiatan penyediaannya masuk kedalam alokasi belanja modal. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, pemerintah daerah masih menggunakan DAU sebagai sumber dalam pembiayaan belanja modal. Adapun tujuan dari belanja modal adalah untuk menambah aset atau kekayaan daerah. Hasil dari aktivitas belanja ini digunakan untuk melaksanakan pelayanan fisik kepada publik.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menemukan adanya hubungan positif yang tidak signifikan dari DAK terhadap belanja modal, maka dari itu hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,583 > 0,05$ dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($0,550 > 1,969$), dan nilai koefisien DAK sebesar 0,050. Ini menunjukkan bahwa ketika DAK meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak berpengaruh signifikan

Sejak pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020, pemerintah pusat bergerak cepat menginstruksikan seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk melakukan realokasi serta *refocusing* anggaran (Sekretariat Presiden, 2020). Secara umum, *refocussing* anggaran ini bertujuan agar dana yang tersedia dapat optimal untuk penanganan dampak COVID-19. Bentuk dari kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran S.247/MK.07/2020 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota penerima DAK Fisik. Surat edaran ini berisi arahan agar menghentikan proses pengadaan barang dan jasa baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya. Penghentian dilakukan pada seluruh jenis dan tahapan proses pengadaan

barang/jasa yang dilakukan, baik kegiatan konstruksi maupun kegiatan lainnya yang melalui Penyedia maupun Swakelola. Hal ini juga termasuk pada sub-bidang Gedung Olahraga (GOR) dan sub-bidang perpustakaan daerah. *Refocusing* anggaran ini dilakukan karena dibutuhkannya konsentrasi dan pendanaan pada bidang Kesehatan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menemukan adanya hubungan positif yang tidak signifikan dari DBH terhadap belanja modal, maka dari itu hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,265 < 0,05$ dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($1,117 > 1,969$), dan nilai koefisien DBH sebesar $0,036$. Ini menunjukkan bahwa ketika DBH meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak berpengaruh signifikan.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui alokasi anggaran ke sektor belanja modal merupakan salah satu yang diharapkan dilakukan oleh pemda dengan adanya DBH ini. Namun demikian, jumlah kontribusi DBH yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti DAU, dan DAK membuat pengaruh DBH terhadap belanja modal menjadi tidak signifikan. Hal ini mungkin disebabkan karena penerimaan DBH lebih diprioritaskan untuk membiayai pengeluaran daerah yang lain seperti pengeluaran rutin untuk perawatan dan lainnya (Mundiroh, 2019).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menemukan adanya hubungan positif yang tidak signifikan dari PAD terhadap belanja modal, maka dari itu hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,211 < 0,05$ dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($1,255 < 1,969$), dan nilai koefisien PAD sebesar $0,075$. Ini menunjukkan bahwa ketika PAD meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak berpengaruh signifikan.

Selama pandemi COVID-19 berlangsung, upaya pemenuhan PAD tersebut mengalami keterlambatan hingga berujung pada penurunan jumlah PAD. Walaupun demikian, jumlah PAD se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2020 masih terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan dana perimbangan yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat. PAD yang tinggi ini kemungkinan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan belanja yang memiliki porsi lebih besar seperti belanja pegawai.

Menurut teori agensi yang terimplementasi pada otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur keuangan daerahnya guna mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah merespon tingginya belanja pegawai dengan sumber penerimaan yang tinggi pula yaitu menggunakan PAD.

Pengujian Terjadinya *Flypaper Effect*

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada tabel 4 diperoleh hasil bahwa variabel PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, koefisien yang dimiliki PAD ($0,075$) juga lebih rendah dibanding dengan DAU ($0,796$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 1 satuan PAD hanya dapat meningkatkan belanja modal sebesar $7,5\%$ sedangkan pada DAU hal itu dapat meningkatkan belanja modal sebesar $79,6\%$. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja modal provinsi/kabupaten/kota se Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021.

Terjadinya *flypaper effect* ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai kepentingan pelayanan publiknya. Hal ini dapat terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat melakukan pengeluaran yang berlebih menggunakan dana transfer (Jannah & Kurnia, 2020).

Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik pada pengujian 2, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi DAU sebesar $0,642 > 0,05$ dengan t hitung $< t$ tabel ($-0,465 < 1,988$) sehingga

hasil uji tidak signifikan, dengan nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,202 yang artinya DAU memiliki hubungan yang negatif

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin bergantung pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat maka hal itu dapat membuat penurunan pada efisiensi belanja daerah atau dengan kata lain belanja daerah yang dikeluarkan menjadi boros karena tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan daerah. Namun demikian, pada penelitian ini penurunan tersebut tidak berpengaruh signifikan atau dengan kata lain pengaruh yang diberikan relatif rendah.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* yang terjadi pada belanja modal tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi keuangan pemerintah daerah se-Jawa dan Bali pada tahun 2019-2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal masih terikat pada dana transfer. Namun dalam kaitannya terhadap belanja daerah secara umum, pemerintah daerah masih dapat mengupayakan efisiensinya sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada rentang tahun 2019-2021, pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan Jawa masih menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) secara signifikan dalam melakukan pembiayaan terhadap belanja modal. Besarnya porsi DAU dan sifat dinamis yang dimilikinya memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana ini dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik. Hal ini berbanding terbalik dengan sumber penerimaan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada DAK dan DBH, jumlah dana yang terbatas dan perintah untuk melakukan *refocussing* anggaran oleh pemerintah pusat guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19, menjadi alasan dibalik tidak signifikannya kedua sumber penerimaan ini dalam membiayai belanja modal. Sedangkan, PAD digunakan untuk kepentingan belanja yang memiliki porsi lebih besar seperti belanja pegawai sehingga jumlah yang dialokasikan untuk belanja modal menjadi tidak signifikan.

Lebih signifikannya dana transfer dibanding dengan PAD dalam membiayai belanja modal, membuat *flypaper effect* dinyatakan “telah terjadi” pada alokasi anggaran keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana transfer dibanding PAD dalam membiayai belanja modal. Dalam pengujian selanjutnya, *flypaper effect* ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terjadi pada belanja modal masih mampu dikontrol oleh pemerintah daerah sehingga efisiensi belanja daerah yang dilakukan mampu untuk mendatangkan pendapatan daerah secara maksimal. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu kiranya mempertimbangkan adanya *flypaper effect* pada penyusunan anggaran di tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Bagi pemerintah daerah, terjadinya *flypaper effect* pada belanja modal pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021 perlu ditanggapi agar kedepan dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Usaha yang dapat dilakukan seperti dengan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam melakukan belanja modal. Selain itu, superioritas pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah memungkinkan pihaknya untuk melakukan pengeluaran dengan dana transfer. Untuk itu, pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan lain dan mengkaji lebih dalam topik serupa misalnya dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara sehingga dapat menggambarkan perilaku aparatur dan menjelaskan penyebab terjadi *flypaper effect* secara kualitas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4). <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216>
- Afifta, V. M., & Rahayu, S. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal The Effect Of Regional Original Revenue , General Allocation Fund , And Special Allocation Fund On Capital Expenditure*. 9(2), 518–524.
- Apriyanto, J. D. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014*.
- Azhar, M. R. (2018). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Naskah Publikasi*.
- Chadiza, N., & Syahnur, S. (2022). *Flypaper Effect Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. 7(1), 35–44.
- Dewi, N. A. W. T., & Wiguna, I. G. N. H. (2019). Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 201–222.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427>
- Jannah, H., & Kurnia, Dr., S.E., M.SI., AK., CPA., C. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1–19.
- Junaedy. (2015). *Jurnal F utur E*. 102–114.
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(3), 1109–1128.
- Kesuma, D. (2022). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah dan Implikasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 11(1), 1439–1450.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122>
- Nopitasari, E. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Syariah IAIN Surakarta*, 1–80. <https://core.ac.uk/download/pdf/296469733.pdf>
- Noviarti, H., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Indonesia.

E-Proceeding of Management, 8(5), 5300.
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/171552/jurnal_eproc/

- Octaviana, V. (2021). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(4), 43–55.
- Pangesti, M. D., & Faridatussalam, S. R. (2022). *Analisis Flypaper Effect Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020*.
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/103975%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/103975/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Paramartha, M., & Budiasih, I. (2016). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan*, 15(2), 1536–1564.
- Prabawati, P. S. S., & Wany, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, XV(1), 1. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.414>
- Putri, Z. M., & Kurnia. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi STESIA*, 9(1), 1–22.
- Radjak, L. I., & Latarang, S. K. (2021). Analisis Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Di Provinsi Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 47. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.47-56.2021>
- Rianti, I. D. A. (2020). Flypaper Effect Pada DAU DAK PAD Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 9(10), 1–21.
- Susanti, S., Fahlevi, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). Halaman 183-191 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- Tasri, A. (2019). The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia. *European Journal of Engineering and Formal Sciences*, 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.2478/ejef-2018-0003>